

PENGUKURAN KINERJA DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* SEBAGAI PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE*

Miftakul Erviani Indah Novitasari

Miftakulervianiindah@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to size, to analyze, and to find out the performance of the Financial and Local Tax Management Agency of Surabaya in 2018-2019 which is measured by the Accountability Performance Reports of the Government Agency by applying the Value For Money. The method of this study is qualitative descriptive, with primary and secondary data as the source of the data. The study collects the data by utilizing interviews and documentaries, the informants of this study are the head of the planning activities program sub-section and 2 staffs of the planning activities program. The technique of this data analysis are collecting, processing, presenting, and taking conclusion. The result of this study indicates the Financial and Local Tax Management Agency of Surabaya are economic, efficient, and effective. The economic measurement refers to the budget with the realisation budget. The efficient measurement is based on the comparison between the output and the input. The effectivity can be monitored from the comparison between the outcome and the output, which the outcome as the impact of the activities program that have been done. The result of the analysis of the Good Governance with the accountability and the transparency principal, the accountability performance of the Financial and Local Tax Management Agency of Surabaya is accountable. The transparency performance of the agency is succeed for presenting its transparency to the public.

Keywords: value for money, economic, efficient, effectivity, good governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur, menganalisis, serta mengetahui bagaimana kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun 2018 dan 2019 yang diukur dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan menggunakan *Value For Money*. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu kepala sub bagian penyusunan perencanaan kegiatan dan 2 staff penyusunan perencanaan kegiatan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah ekonomi, efisien, dan efektif. Pada pengukuran ekonomi mengacu pada anggaran atau *input* dengan realisasi anggaran. Pengukuran efisien berdasarkan perbandingan jumlah realisasi *output* yang dihasilkan dengan *input*. Sedangkan pengukuran efektivitas dapat dilihat dari perbandingan *outcome* dan *output*, dimana nilai *outcome* yaitu dampak yang ditimbulkan atas program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan hasil dari penilaian *Good Governance* dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi, penilaian akuntabilitas yang diukur dari LAKIP dan SAP menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah menjalankan kerjanya dengan akuntabel. Dan penilaian dari transparansi menunjukkan telah berhasil dalam menyelenggarakan transparansi kepada masyarakat.

Kata Kunci: value for money, ekonomi, efisien, efektivitas, good governance, akuntabilitas, transparansi

PENDAHULUAN

Dengan adanya pergerakan arus globalisasi yang cepat, dapat mempengaruhi perkembangan organisasi sektor publik di Indonesia menjadi semakin pesat. Oleh sebab itu,

masyarakat juga semakin cerdas dan kritis terhadap penyelenggaraan pembangunan yang dimana masyarakat mensyaratkan adanya transparansi serta akuntabilitas publik. Sektor publik kerap dianggap jauh tertinggal dari kemajuan pada sektor swasta. Sektor publik juga sering dianggap lebih rendah kedudukannya daripada sektor swasta terlebih dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri.

Berbagai kritikan juga muncul terhadap sektor publik yang dinilai masyarakat sebagai wadah inefisien, sumber kebocoran dana, pemborosan serta lembaga yang dianggap merugikan. Dengan adanya kritikan tersebut timbulah gerakan untuk melaksanakan reformasi sektor publik yaitu timbulnya konsep *New Public Management* yang pada awalnya dikenalkan oleh Christopher pada tahun 1991. Dalam implementasi konsep *New Public Management* mempengaruhi terjadinya pergantian manajemen sektor publik sangat cepat, dimana pola manajemen yang semula tradisional dan kaku, birokratis, dan hierarkis kini telah menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar (Mardiasmo, 2018:20).

Akuntabilitas publik pada umumnya bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, bukan sekedar itu akuntabilitas publik juga berkaitan dengan suatu kewajiban dalam memberikan informasi serta pertanggungjawaban tentang apa yang telah, sedang, dan akan direncanakan oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas publik juga berguna sebagai alat ukur kinerja suatu instansi pemerintah, maka dapat diketahui sejauh mana kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan.

Menurut Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik yaitu kewajiban pemegang amanah (*agent*) memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak amanah (*principal*) yang mempunyai hak serta kewenangan guna meminta pertanggungjawaban itu.

Pemerintah merupakan suatu entitas yang mempunyai fungsi dan tujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menjalankan peran sebagai organisasi *non profit*. Pelayanan publik didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban, dan tujuan dalam pemenuh kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik. pemerintah juga berkewajiban untuk melayani setiap warga negara atau penduduk guna memenuhi hak serta kebutuhan dasarnya (*fundamental human rights*). Aspek kebutuhan serta kepuasan masyarakat juga harus diperhatikan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik (Rismawati dan Mattalata, 2018:3).

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi acuan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), Pemerintahan yang baik merupakan bentuk dari keberhasilan dalam menjalankan atau melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan begitu pemerintah menjadi pelaku utama untuk menjalankan *good governance* yang dituntut sebagai pemberi pertanggungjawaban yang lebih akurat atau benar.

Dalam organisasi sektor publik, pengukuran kinerja dianggap faktor penting di dalam sebuah organisasi. Bukan hanya menilai anggaran sektor publik, akuntabilitas pengukuran kinerja suatu organisasi juga diperlukan untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, berkualitas, serta tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik juga dilakukan guna membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja maupun kegiatan yang ada dalam organisasi. Dengan ini organisasi sektor publik harus meningkatkan efisien dan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan publik kepada pengguna layanan publik. Selain itu pengukuran kinerja digunakan sebagai pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009:131).

Konsep *value for money* merupakan sebuah prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasari pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Agar dapat tercapainya *value for money* di organisasi sektor publik yaitu dengan menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai *output* yang *optimum* dalam mewujudkan ataupun mencapai tujuan dari organisasi.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka di dapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengukuran kinerja dengan pendekatan *Value for Money* sebagai perwujudan *Good Governance* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya?. Berdasarkan Rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengukuran kinerja dengan pendekatan *value for money* sebagai perwujudan *Good Governance* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Organisasi Sektor Publik

Organisasi merupakan suatu perserikatan formal, terstruktur, dan terorganisasi yang dikumpulkan menjadi satu agar mencapai suatu tujuan organisasi. Setiap organisasi harus mempunyai manajemen yang dapat melaksanakan fungsi organisasi dengan baik. Karena dengan adanya manajemen organisasi, pengawasan, dan pengendalian kinerja pada anggota organisasi atau sumber daya lainnya yang berguna untuk menjalankan suatu organisasi berdasarkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Fahmi (2013:1) menyatakan bahwa organisasi diartikan sebagai suatu wadah yang memiliki berbagai peran, memiliki tujuan mampu memberikan dan mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan juga kepuasan bagi pemiliknya. Berbeda dengan Sungadi (2011:25) yang menyatakan bahwa dalam perkembangan ilmu administrasi publik di Indonesia, organisasi publik yaitu organisasi yang berbeda dengan organisasi sektor swasta. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tidak mencari keuntungan akan tetapi lebih ke arah mendapatkan manfaat.

Menurut Mahsun (2009:14) dapat ditinjau dari tujuan dan sumber pendanaannya terdapat dua tipe organisasi sektor publik, yaitu: a. *Pure Non Profit Organization*, memiliki tujuan untuk menyediakan atau menjual barang maupun jasa dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, dan penerimaan pemerintah lainnya, b. *Quasi Non Profit Organization*, bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dalam melayani dan memperoleh keuntungan (*surplus*). Sumber pendanaannya berasal dari investor pemerintah atau swasta dan kreditor.

Pengukuran Kinerja

Istilah kinerja atau *performance* juga sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu ataupun kelompok individu. Menurut Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 indikator kinerja ialah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Istilah kinerja juga sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program guna mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja hanya bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah disepakati. Keberhasilan juga memiliki kriteria yang berupa tujuan atau target tertentu yang akan dicapai. Kinerja seseorang atau organisasi juga harus mempunyai tolak ukur, karena tanpa ada tujuan atau target maka, kinerjanya tidak dapat diketahui.

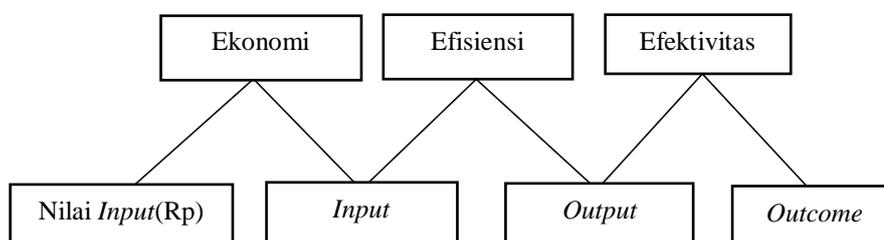
Pengukuran kinerja yaitu suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan

sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas dalam tindakan guna mencapai tujuan (Mahsun, 2011:141).

Menurut Mahmudi (2007:14) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada sektor publik adalah: (1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, (2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai, (3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya, (4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward dan punishment*, (4) Memotivasi pegawai, (6) Menciptakan akuntabilitas pegawai.

Value For Money

Mardiasmo (2009:4) menjelaskan *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang mendasarkan tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Manfaat implementasi konsep *Value for Money* pada Organisasi Sektor Publik yaitu: (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, (2) Meningkatnya mutu pelayanan publik (3) Menurunkan biaya pelayanan publik dikarenakan hilangnya inefisien dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*, (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, (5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Secara skema, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Konsep *Value For Money*
Sumber: Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Mahsun 2006

Berikut pengertian dari masing-masing elemen tersebut:

Ekonomi

Menurut Mahmudi (2010:59) ekonomi terkait dengan penggunaan *input* primer yang berupa anggaran atau kas yang menjadi *input* regular berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasional organisasi. Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar (Mahmudi,2010:59). Teknik untuk mengukur tingkat ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Anggara (Rp)}} \times 100\%$$

kriteria:

Jika <100% = ekonomis

Jika >100% = tidak ekonomis

Jika =100% = ekonomis berimbang

Efisiensi

Menurut Mahmudi (2010:59) efisiensi adalah hubungan antara *output* berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Proses kegiatan dikatakan efisien apabila suatu hasil kinerja atau produk yang

dihasilkan dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-sendahnya (*spending well*). Teknik untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

kriteria:

Jika <100% = efisien

Jika >100% = tidak efisien

Jika =100% = efisien berimbang

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (*target*) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil yang diharapkan yaitu *outcome*, sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Teknik untuk mengukur tingkat efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output}}{\text{Outcome}} \times 100\%$$

Kriteria:

Jika >100% = efektif

Jika <100% = tidak efektif

Jika =100% = efektif berimbang

Good Governance

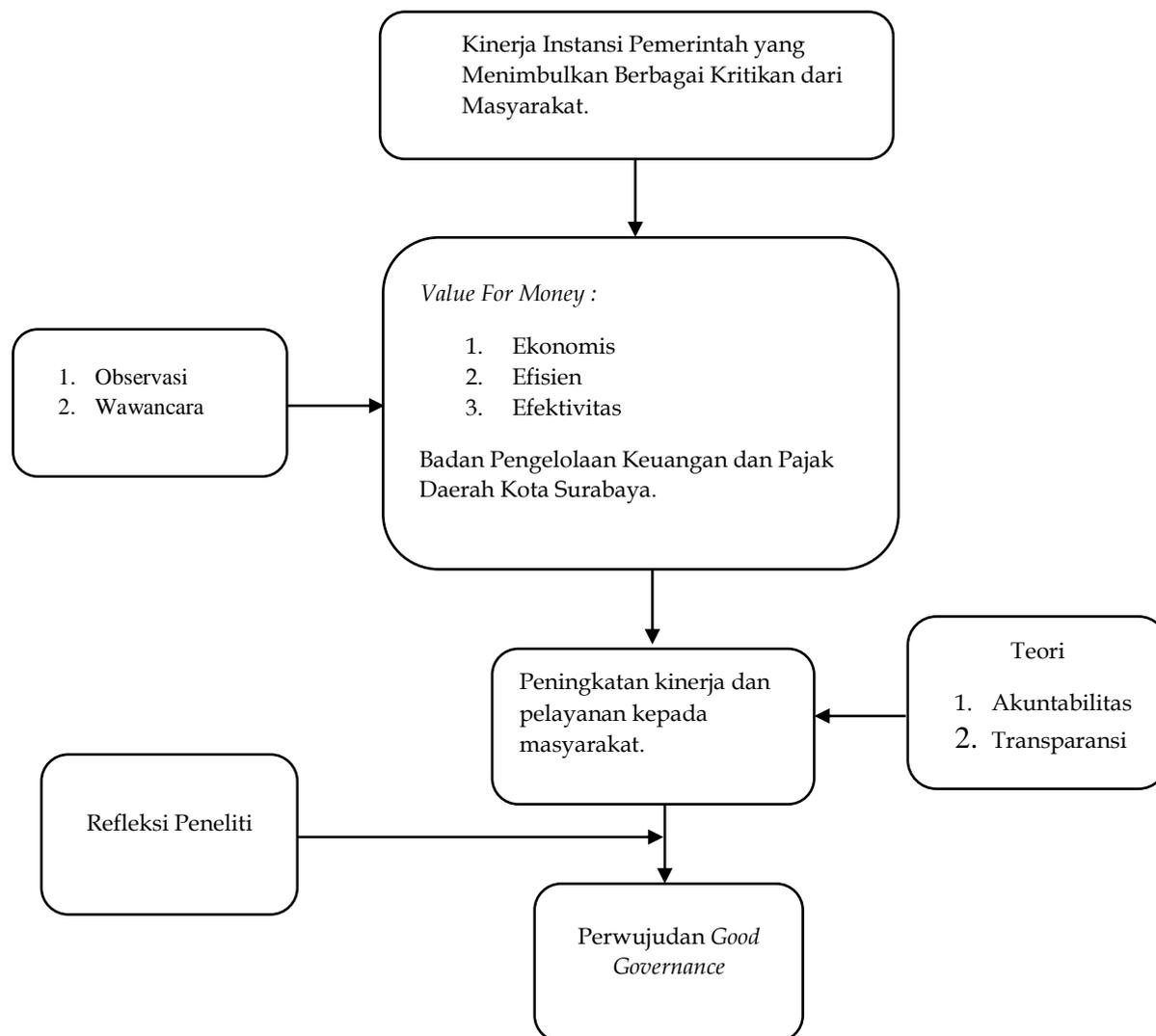
Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan sebuah prinsip yang sejalan dengan demokrasi, partisipasi masyarakat yang harus dijalankan dalam sektor kehidupan. *Good Governance* memiliki fungsi untuk terciptanya transparansi (keterbukaan) antara pemerintah dengan masyarakat sehingga menjadi pemerintahan yang bersih. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan penyelenggaraan aturan-aturan pemerintah dengan menerapkan *good governance*.

Dalam penerapan *good governance* diharapkan dapat membangun pemerintahan yang bersih dengan perangkat pemerintahannya terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dapat didefinisikan bahwa tata pemerintahan yang baik yaitu sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial yang substansial dan dalam penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil secara efisien dan merata (Luthfi *et al.*, 2014:51). Dalam penelitian ini penulis membutuhkan: (1) Akuntabilitas: Menurut Mardiasmo (2006:3) akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, yang biasanya melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara teratur atau berkala. Akuntabilitas juga berarti kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segera aktivitas dan kegiatan yang bersangkutan dengan pengguna sumberdaya publik kepada pemberi amanat(mandat) (Mahmudi 2010:23). (2) Transparansi: Transparansi memiliki arti keterbukaan, yang berarti agar pemerintah mempunyai keterbukaan kepada warganya, transparansi dibangun dengan dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Menurut Krina (2003:13) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya dan juga hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya

penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam pemegang amanat dari rakyat. Agar dapat terwujud penyelenggaraan pemerintah yang baik transparansi merupakan salah satu aspeknya. Adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah juga termasuk perwujudan tata pemerintah yang baik (Sabarno 2007:38).

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis serta hasil pemikiran terdahulu, maka dapat disusun rerangka pemikiran yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2
Rerangka Pemikiran

Penelitian Terdahulu

Penelitian Indrayani dan Khairunnisa (2018) yang berjudul Analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe studi kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016. Menyatakan dapat menerapkan *value for money* sebagai konsep pengukuran kinerjanya, karena dengan konsep *value for money* pemerintah dapat mengukur kinerja organisasi dengan lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan mendatang. Nada (2016)

Pengukuran kinerja unit kerja Pemerintah Daerah dalam perspektif *value for money* pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Menyatakan pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis melalui program *E-performance* yang dimana dapat menjalankan tujuan organisasi, yang dimana rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi sektor publik dapat direalisasikan sesuai dengan target yang diharapkan. Yuliono (2019) dengan judul Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik. Menyatakan bahwa Dispendukcapil Surabaya telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*, dan dampak dari pengimplementasian tersebut adalah meningkatkan kemampuan para pegawai, meningkatnya kesadaran para pegawai akan menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya, masyarakat mengetahui serta memahami hal-hal yang terkait informasi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik karena melibatkan masyarakat akan pengambilan keputusan, tidak adanya kesenjangan sosial serta keadilan dirasakan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder yang menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung, dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: (1) Survey Pendahuluan yang berguna untuk mengetahui gambaran umum pada objek penelitian serta situasi, kondisi, dan juga permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan survei pendahuluan atau kunjungan awal pada objek penelitian. (2) Wawancara, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dalam metode survey dengan menggunakan teknik tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian. (3) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa langsung pada dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut: (1) Mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, (2) Mendeskripsikan data penelitian yang berkaitan dengan kajian peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, (3) Melakukan analisis data dan pembahasan mengenai pengukuran dengan metode *value for money* dan *good governance* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, (4) Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penilaian Value For Money
Ekonomi

Berdasarkan tingkat capaian program serta kegiatan yang ada dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada tahun 2018 sampai dengan 2019, jadi target anggaran yang telah dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Pengukuran Ekonomi Tahun 2018

TAHUN	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
2018	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	49.836.900	49.657.500
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.774.204.725	5.333.055.412
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	26.141.263.651	25.550.117.659
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.880.843.330	5.763.914.942
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	4.072.837.633	4.046.538.894
	Jumlah	41.919.026.239	40.743.288.407
2019	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6.705.066.979	6.497.662.529
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	28.803.558.218	27.896.088.805
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.420.389.304	6.323.963.256
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	4.049.245.271	3.995.322.285
	Jumlah	45.978.259.772	44.731.076.875

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Menurut tabel di atas, Pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) program yang memperoleh anggaran dari APBD yaitu: Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan yang terakhir Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan yang memiliki jumlah anggaran secara keseluruhan program Rp41.919.026.239 dan realisasinya sendiri berjumlah Rp40.743.288.407.

Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) program yaitu program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan yang terakhir Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan yang memiliki jumlah anggaran secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp45.978.259.772 dan realisasinya sendiri berjumlah Rp44.731.076.875.

Maka perhitungan untuk pengukuran tingkat ekonomis pada tahun 2018 dan 2019 yang sesuai dengan tabel diatas, adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018: } \frac{40.743.288.407}{41.919.026.239} \times 100\% = 97,19\%$$

$$\text{Tahun 2019: } \frac{44.731.076.875}{45.978.259.772} \times 100\% = 97,28\%$$

Dapat diketahui pada perhitungan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah tahun 2019 lebih besar dari anggaran tahun 2018, anggaran tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp41.919.026.239 dan realisasinya sebesar Rp40.743.288.407 dengan perolehan presentase sebesar 97,19%, sedangkan tahun 2019 anggaran yang ditetapkan Rp45.978.259.724 dan realisasinya sebesar Rp44.978.259.724 dengan perolehan presentase sebesar 97,28%. Dengan ini pencapaian tingkat ekonomis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang memiliki tingkat ekonomis tinggi yaitu tahun 2018. Pada tahun 2018 sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp1.175.737.832 dan tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000 dengan ini dapat dilihat bahwa Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah menjalankan program organisasinya dengan seekonomis mungkin, oleh sebab itu dapat dilihat dari jumlah realisasi pemakaian anggaran lebih kecil dari jumlah anggaran yang sudah ditetapkan.

Berikut ini terdapat hasil wawancara dengan informan selaku Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan menyatakan bahwa:

“Kalo boleh 2018 dan 2019 sudah dikatakan Ekonomis, karena memang kita melihat dari nilai anggaran belanja dan nilai realisasi. Jadi pada anggaran belanja ada SSH (Standar Satuan Harga) itu bias kita realisasikan belanja itu dapat di bawah SSH namun kinerjanya tetap tercapai. jadikan itu dapat kita katakan kegiatan itu bisa kita laksanakan secara Ekonomis tapi dengan *output* yang sama sesuai target yang ingin dicapai.

Berdasarkan analisis pengukuran dari segi ekonomis dengan ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dapat mencapai realisasi anggaran yang lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan atau dapat dikatakan mengalami SILPA pada periode 2018 dan 2019. Meskipun tidak sepenuhnya anggaran diserap, akan tetapi kinerja tetap dapat tercapai dan dapat merealisasikan setiap program yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Sehingga dapat dikatakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 telah memenuhi kriteria ekonomis atau hemat.

Efisiensi

Efisiensi merupakan penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2018 dari kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya telah menyerap anggaran sebesar Rp40.743.284.407 dari dana anggaran sebesar Rp41.918.986.239 atau dengan perolehan persentase sebesar 97,19% dari dana anggaran yang tersedia. Sedangkan di tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya telah menyerap anggaran sebesar Rp44.712.996.875 dari dana anggaran sebesar Rp45.978.259.772 atau dengan perolehan persentase sebesar 97,24% dari dana anggaran yang tersedia.

Pengukuran efisien pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of input*) dikali 100% untuk menghasilkan persentase pencapaian dari program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan, pengukuran ini berdasarkan konsep *value for money*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah telah menjalankan program atau kegiatan di tahun 2018 dan 2019 dengan *input* serendah rendahnya dan telah mampu menghasilkan *output* yang telah ditetapkan Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eka Kasubbag Penyusunan Perencanaan Kegiatan:

“Untuk 2018, 2019 dapat kita katakan Efisien karena bisa kita liat dari capaian kinerjanya dimasing-masing kegiatan, baik itu program kegiatan efisien kan lebih dari 100%. Jadi untuk tahun 2018 dan 2019 memang sudah dapat dikatakan efisien.”

Dengan ini, analisis dari segi Efisiensi telah menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 dapat dikatakan Efisiensi karena dapat mencapai kinerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan dapat menggunakan anggarannya seminimal mungkin.

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:4) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan maupun sasaran yang harus dicapai, kegiatan operasional dapat dikatakan efektif jika proses kegiatan telah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) atau dapat dikatakan efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya sesuai target yang telah ditetapkan. Efektivitas juga tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak daerah yang dibiayai dari Anggaran Penerimaan dan Belanja daerah atau yang biasa disebut APBD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya. Berikut ini merupakan tabel Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya ditinjau dari aspek efektivitas:

Tabel 2
Pengukuran Efektivitas tahun 2018-2019

Indikator Kinerja	2018		Capaian	2019		Capaian
	Outcome	Output	%	Outcome	Output	%
Persentase Kontribusi Pajak Terhadap PAD	75,04%	78,03%	103,99%	75,54%	74,67%	98,85%
Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai Dengan Standart Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	100%	100,57%	100,57%	100%	100,25%	100,25%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91,53%	100%	109,25%	-	-	-
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan	77%	83,66%	129,91%	78%	89,93%	115,29%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	64%	83,14%	129,91%	66%	89,37%	135,41%
persentase kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap	100%	100%	100%	-	-	-

parameter perencanaan pada
operational plan

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah	100%	95,65%	95,65%	100%	99,97%	99,97%
---	------	--------	--------	------	--------	--------

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Dari pencapaian tersebut juga didukung sasaran yaitu mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah dengan indikator kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah yang memiliki target 100% dan realisasinya 99,97% sehingga tingkat efektivitasnya 99,97%. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eka Kasubbag Penyusunan Perencanaan Kegiatan:

“ Untuk tahun 2018 dan 2019 berdasarkan dari data capaian kinerja sama target sesuai dengan data sasaran yang sudah ditetapkan bahkan pencapaiannya dapat melebihi yang kita rencanakan sebelumnya rata-rata diatas 100%. ”

Efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan, akan tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) hasil yang diharapkan merupakan *outcome* dengan hasil yang sesungguhnya dicapai yang merupakan *output*. Berdasarkan hasil dari analisis pengukuran Efektivitas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dapat dikatakan efektif. Karena sesuai dengan tujuan dan sasaran per-indikator yang secara keseluruhan mencapai target 100% bahkan lebih dari 100%.

Penilaian Good Governance

Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang bersangkutan dengan pengguna sumberdaya publik kepada pemberi amanat (mandat) (Mahmudi 20010:23). Prinsip akuntabilitas mewajibkan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2006:3) Pelaksanaan Akuntabilitas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dapat dilihat dari penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan peraturan walikota (perwali) yang dijadikan pedoman dan diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Berikut ini terdapat hasil wawancara dengan informan selaku Kasubbag Penyusunan Perencanaan Kegiatan sebagai berikut:

“Pasti memperhatikan, karena memang apapun yang berjalan di pemerintahan selalu ada dasarnya jadi kita tidak serta merta melaksanakan kegiatan asal jadi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar-standar yang telah ditetapkan. Karena memang nanti kalo kita tidak ada dasar disalahkan kok bisa melaksanakan kegiatan tanpa ada dasar”.

Setiap perencanaan dan penyusunan anggaran selalu memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan peraturan walikota (perwali). Hal ini dijalankan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah termasuk organisasi sektor publik yang diwajibkan untuk menerapkan

peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pemerintah, pelaksanaan ini berguna untuk memberikan hasil kinerja yang lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga digunakan dalam mempertanggungjawabkan proses rencana kerja dengan baik yang sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah menjalankan prosedur maupun peraturan yang berlaku, hal ini juga dapat diartikan bahwa tanggung jawab kepada pemerintah sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prinsip *good governance*.

Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah memenuhi akuntabilitas dengan indikator kegiatan disusun berdasarkan perubahan maupun tuntutan yang ada di masyarakat. Berikut ini terdapat hasil wawancara dengan informan selaku Kasubbag Penyusunan Perencanaan Kegiatan sebagai berikut:

"Iya, karena setiap tahun kita ada forum Perangkat Daerah (PD) sama musrembang untuk menjalin aspirasi dari masyarakat. Forum PD juga lebih spesifik lagi sesuai dengan fungsinya PD, nah dari situ kita menampung aspirasi dari masyarakat lalu direkap, darisitu juga kita akan tau mana yang perlu ditambahkan, evaluasi,perbaikan atau apa yang perlu ditambahkan dikegiatan kita."

Kegiatan diperoleh hasil bahwa kegiatan telah disusun berdasarkan perubahan ataupun tuntutan yang ada di masyarakat dengan adanya forum, hal itu juga dilakukan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam forum demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Hal ini juga sesuai dengan pendapat (Mardiasmo 2006:3). Prinsip akuntabilitas mewajibkan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sesuai dengan upaya-upaya yang telah dilakukan telah menjalankan prosedur maupun peraturan yang berlaku, hal ini juga dapat diartikan bahwa tanggung jawab kepada masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prinsip *good governance*.

Transparansi

Transparansi menurut Krina (2003:13) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya dan juga hasil-hasil yang telah dicapai.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pada akhirnya akan tercipta *horizontal accountability* antara pemerintahan daerah dengan masyarakat sehingga terciptanya pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2000).

Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah telah menerapkan prinsip pelayanan publik yaitu kejelasan dengan Masyarakat dapat mengakses informasi-informasi terkait pelaksanaan program maupun kegiatan. Hal tersebut didukung dengan penjelasan dari informan selaku pengguna layanan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang menyatakan bahwa:

“Untuk akses informasi pelaksanaan program maupun kegiatan sudah cukup. Namun perlu di tingkatkan dan di *update* pada website maupun sosial media seperti *facebook*, *instagram* agar masyarakat lebih mudah mengetahui akan informasi yang dibutuhkan.”

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah telah berhasil dalam menyelenggarakan transparansi terkait dengan masyarakat dapat mengakses informasi-informasi seperti pelaksanaan program maupun kegiatan, akan tetapi terdapat langkah yang harus ditingkatkan dalam penyampaian informasi melalui media sosial yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah juga termasuk perwujudan tata pemerintah yang baik.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan informan selaku Kasubbag Penyusunan Perencanaan Kegiatan sebagai berikut:

“Bisa dilakukan di *Surabaya.go.id* tapi kita hanya sampai *lever* program. Itu juga berguna supaya masyarakat cepat mengetahui informasi-informasi biasanya kita sampaikan secara langsung atau secara online. *Website* remsinya juga ada seperti *e-wadul*, sapa warga, di *website* resmi BPKPD juga ada jadi secara online kita memang sudah memfasilitasi. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.”

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Menurut hasil analisis dan pembahasan tentang pengukuran kinerja *Value For Money* dan penilaian *Good Governance* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa: (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah melaksanakan kewajibannya dalam menyajikan laporan kinerja dan dapat dikatakan telah sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah menyajikan perencanaan strategis organisasi dan implementasinya, serta tolak ukur keberhasilan dari setiap kegiatan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai tujuan organisasinya; (2) Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi ekonomis menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dinyatakan dalam perhitungan persentase yaitu sebesar 97,19% untuk tahun 2018 dan di tahun 2019 sebesar 97,28% . dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja telah ekonomis atau telah berhasil mengelola penggunaan anggaran dengan baik dan hemat; (3) Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya selama tahun 2018 dinyatakan dalam perhitungan presentase yaitu sebesar 97,19% untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019 sebesar 97,24% dengan ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 lebih hemat dari tahun 2019. Hal ini tidak menjadi hambatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya untuk mencapai tingkat efisiensinya. Tingkat efisiensi diukur dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang telah dihasilkan dengan *input* yang digunakan, yang mana target dan anggaran untuk setiap tahun 2018 dan 2019 secara keseluruhan telah digunakan secara efisien dan mampu menjalankan kegiatan secara *optimal*; (4) Hasil pengukuran kinerja dari segi efektivitas menunjukkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 dinilai efektif. Hal ini diukur berdasarkan hasil-hasil yang dicapai *output* maupun *outcome*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah dapat menjalankan tujuan organisasi dimana seluruh target dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan; (5) Pelaksanaan *good governance* ditinjau dari prinsip akuntabilitas telah dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah

menjalankan prosedur maupun peraturan yang berlaku, hal ini juga dapat diartikan bahwa tanggung jawab kepada pemerintah sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prinsip *good governance*; (6) Pelaksanaan *good governance* ditinjau dari prinsip transparansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya telah berhasil dalam menyelenggarakan transparansi terkait dengan masyarakat dapat mengakses informasi-informasi seperti pelaksanaan program maupun kegiatan. Dengan ini dapat diketahui pula bahwa penerapan *good governance* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya termasuk baik yang mana penilaiannya diukur dengan menggunakan indikator akuntabilitas dan transparansi.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan. Maka, dapat disusun keterbatasan pada penelitian ini yaitu: (1) Narasumber hanya terdiri dari 3 orang dan diwakili oleh 1 Sub bagian, sehingga dalam penelitian ini masih banyak kekurangan; (2) Pada penelitian ini menggunakan 2 prinsip dari 9 prinsip *good governance*, sehingga belum mewakili prinsip *good governance*.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dan bagi kesempurnaan peneliti selanjutnya yaitu: (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk lebih menunjang *good governance*; (2) Dalam meningkatkan ekonomis, efisien, dan efektivitas kegiatan organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya perlu selalu berinovasi dalam setiap kegiatan agar dapat berjalan semakin baik lagi untuk kedepannya; (3) Keberhasilan yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya perlu dijadikan sebagai motivasi kerja bagi seluruh pegawai agar dapat selalu meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Surabaya; (3) Hasil penelitian pengukuran kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja organisasi dan juga bermanfaat sebagai masukan dalam pengambilan keputusan untuk tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, I. 2013. *Perilaku Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Fitiani 2017. *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumbang Periode Tahun 2014-2016*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah .Makassar.
- Hermansayah, I. R.M, dan M. Suherman. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi*4(5) : 1-16.
- Indrayani, dan Khairunnisa. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6(1) : 1-10.
- Indriantoro dan Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Penerbit BFEE UGM. Yogyakarta
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.No.260/KEP/M.PAN2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Jakarta.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- LAN dan BPKP.2000.Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.Cetakan pertama. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

- Luthfi J. Kurniawan, Hesti Puspitosari, Khalikussabir, 2014, *Filosofi Pelayanan Publik*, Penerbit Setara Press. Malang
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- _____. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.
- _____. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.
- _____. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Nada, S.L. 2016. *Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(6) : 1-17.
- Purwiyanti, D. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Jurnal Akuntansi* 7(3) : 90-98.
- Purwiyanti, D. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Jurnal Akuntansi* 5(3): 190-200.
- Sabarno. H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sungadi, Y.S. 2011. *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suwandi, M.M. 2017. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Value For Money*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(2): 457-477.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126. Jakarta.
- Wildani, R. W. 2019. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* pada Dinas Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu. *Jurnal Akuntansi* 6(2):155-169.
- Wuwungan, G.T, J. Tinangon, dan S. Rondonuwu. 2019. Penerapan Metode *Value For Money* Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal Akuntansi* 3(7):100-110.
- Yuliono, R. N. 2019. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi Empiris Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(11): 1-15.